

**PENGARUH RASIONALISASI ANGGARAN KOMPETENSI APARATUR
KEUANGAN, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PADA KECAMATAN DI KABUPATEN TANAH DATAR**

***THE INFLUENCE OF BUDGET RATIONALIZATION, COMPETENCE OF
FINANCIAL PERSONNEL, AND INTERNAL CONTROL SYSTEMS ON FINANCIAL
PERFORMANCE IN SUB-DISTRICTS WITHIN TANAH DATAR REGENCY***

Watmawati^{1)*}, Fitria²⁾

^{1)*}Institut Teknologi dan bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi, watmawati.mhs@gmail.com

²⁾Institut Teknologi dan bisnis Haji Agus Salim, Bukittinggi, fitriaedwar85@gmail.com

ABSTRAK: Penelitian ini mengkaji pengaruh rasionalisasi anggaran, kompetensi aparatur keuangan, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan pemerintah kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh belum optimalnya kinerja keuangan yang tercermin dari adanya rekomendasi audit BPKP, fluktuasi realisasi anggaran, serta adanya inkonsistensi dari temuan-temuan riset terdahulu. Pendekatan kuantitatif dengan metode survei diterapkan dalam studi ini. Populasi penelitian mencakup 112 pejabat pengelolaan keuangan yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, di mana 47 responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data memanfaatkan skala Likert, sementara analisis data dilakukan melalui teknik PLS-SEM menggunakan perangkat lunak SmartPLS versi 4. Hasil analisis menunjukkan bahwa rasionalisasi anggaran dan kompetensi aparatur keuangan berdampak positif serta signifikan terhadap kinerja keuangan. Implikasi dari temuan ini menegaskan bahwa penyempurnaan perencanaan serta alokasi anggaran, beserta peningkatan keahlian personel pengelola keuangan, menjadi elemen krusial dalam mendongkrak kinerja keuangan kecamatan. Sebaliknya, penerapan sistem pengendalian internal belum menunjukkan kontribusi langsung. Riset lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi variabel lain seperti pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, manajemen risiko, atau gaya kepemimpinan, serta memperluas cakupan wilayah penelitian demi memperoleh temuan yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: *Rasionalisasi anggaran; Kompetensi aparatur keuangan; Sistem pengendalian internal; Kinerja keuangan*

ABSTRACT: The objective of this study is to analyze the effect of budget rationalization, financial apparatus competence, and internal control systems on the financial performance of subdistrict governments in tanah datar regency. The research was motivated by suboptimal financial performance as indicated by unresolved audit recommendations, variations in budget realization, and inconsistent findings from previous studies. This study employed a quantitative approach using a survey method. The population consisted of 112 financial management officers from 14 subdistrict in Tanah Datar Regency, while 47 respondents were selected through purposive sampling. Data were collected using Likert scale and analyzed by PLS SEM using Smart PLS version 4. The results indicate that budget rationalization and financial apparatus competence have a positive and significant effect on financial performance. These findings imply that improving budget planning and allocation as well as enhancing the competence of financial management personnel are the key factors in improving subdistrict financial performance, whereas the implementation of the internal control system has not yet provided a direct contribution. Future research is urged to incorporate more variables, such as information technology utilization, organizational commitment, risk management, or leadership style, and to expand the research scope to obtain more comprehensive findings.

Keywords: *Budget rationalization; Financial apparatus competence; Internal control systems, Financial performance*

A. PENDAHULUAN

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan publik. Pengelolaan keuangan yang berkualitas tidak hanya ditunjukkan oleh tingginya tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2018), kinerja keuangan sektor publik mencerminkan tingkat keberhasilan organisasi pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya secara ekonomis, efisien, dan efektif. Sejalan dengan itu Mahmudi (2019) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja keuangan diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program, meningkatkan akuntabilitas, serta menjadi dasar perbaikan pengelolaan keuangan pada periode berikutnya. Oleh karena itu, peningkatan kinerja keuangan menjadi salah satu aspek yang terus mendapat perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu pemerintah daerah di Provinsi Sumatera Barat juga terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya. Meskipun Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, hasil pemeriksaan masih menunjukkan adanya beberapa rekomendasi yang memerlukan tindak lanjut, terutama berkaitan dengan pengelolaan aset, administrasi keuangan, serta penguatan sistem pengendalian intern. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa opini WTP belum sepenuhnya menggambarkan tidak adanya kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, kecamatan sebagai perangkat daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten memiliki tanggung jawab dalam mengelola anggaran secara efektif dan akuntabel sehingga kualitas pengelolaan keuangan pada tingkat kecamatan turut menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan.

Kinerja keuangan pada entitas pemerintah daerah menjadi parameter krusial yang mencerminkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pada tingkat kecamatan, diperlukan peran pengelolaan keuangan dalam mendukung pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai permasalahan, seperti belum optimanya realisasi anggaran, masih adanya rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat (2025) yang memerlukan tindak lanjut, serta perbedaan capaian kinerja antar kecamatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan kecamatan masih memerlukan perbaikan agar mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

Beberapa faktor yang diduga memengaruhi kinerja keuangan kecamatan antara lain rasionalisasi anggaran, kompetensi aparatur keuangan, dan sistem pengendalian internal. Rasionalisasi anggaran menjadi salah satu strategi yang dilakukan pemerintah untuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan skala prioritas sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih optimal. Di sisi lain, kompetensi aparatur keuangan menentukan kemampuan pegawai dalam melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan secara tepat. Selain itu, sistem pengendalian internal berperan memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan organisasi telah dilaksanakan secara efektif, efisien, andal, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dalam perspektif Stewardship Theory, aparatur pemerintah sebagai pengelola organisasi diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan publik.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah telah banyak dilakukan, namun masih menunjukkan hasil yang belum konsisten. Sejumlah penelitian menemukan bahwa rasionalisasi anggaran dan kompetensi aparatur keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda, khususnya pada variabel sistem pengendalian internal dimana sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan. Inkonsistensi hasil tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas sistem pengendalian internal dapat dipengaruhi oleh karakteristik organisasi, kualitas implementasi, maupun kapasitas aparatur yang menjalankannya. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut pada konteks organisasi yang berbeda untuk memperoleh bukti empiris yang lebih komprehensif.

Berdasarkan fenomena empiris dan adanya kesenjangan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh rasionalisasi anggaran, kompetensi aparatur keuangan, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini memiliki kebaruan pada objek penelitian yang berfokus pada kecamatan sebagai perangkat daerah dengan karakteristik pengelolaan keuangan yang berbeda dibandingkan organisasi perangkat daerah lainnya. Selain itu, Penelitian ini mengintegrasikan rasionalisasi anggaran, kompetensi aparatur keuangan, dan sistem pengendalian internal dalam satu model penelitian untuk menganalisis pengaruhnya terhadap kinerja keuangan kecamatan menggunakan analisis Structural Equation Modeling (SEM) dengan estimasi berbasis Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan kajian akuntansi sektor publik serta menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pada tingkat kecamatan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan desain survei guna memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh rasionalisasi anggaran, kompetensi aparatur keuangan, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja keuangan kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Data memakai data primer yang diperoleh dari kuisisioner yang disebarkan kepada responden.

Penelitian ini menggunakan populasi sebanyak 112 aparatur yang terlibat dalam pengelolaan keuangan pada 14 kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Penetapan sampel dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu keputusan dalam pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu meliputi camat, Sekcam, Kasubag Perencanaan dan Keuangan, PPTK, bendahara, dan staf yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 47 responden sebagai sampel penelitian.

Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang disusun berdasarkan indikator setiap variabel penelitian. Seluruh pernyataan diukur menggunakan skala Likert lima poin, yaitu skor 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan skor 5 (sangat setuju). Sebelum dilakukan analisis, data terlebih dahulu diperiksa kelengkapannya untuk memastikan seluruh kuesioner dapat digunakan dalam proses pengolahan data.

Pengujian atas hipotesis penelitian dieksekusi dengan metode pemodelan persamaan struktural berpendekatan Partial Least Squares (PLS-SEM) menggunakan program SmartPLS versi 4. Tahap analisis pertama berfokus pada pengujian kriteria outer loading untuk menilai model pengukuran (outer loading) melalui pengujian validitas konvergen, validitas diskriminan, dan realibilitas konstruk. Selanjutnya dilakukan evaluasi model struktural (Inner Model) menggunakan nilai koefisien determinasi (R-Square) dan Varince Inflation Faktor (VIF). Hipotesis diuji menggunakan prosedur bootstrapping dengan melihat nilai path coefficient t-statistic, dan p-value. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai t-statistik $> 1,96$ dan p-value $< 0,05$ (Hair et al., 2021).

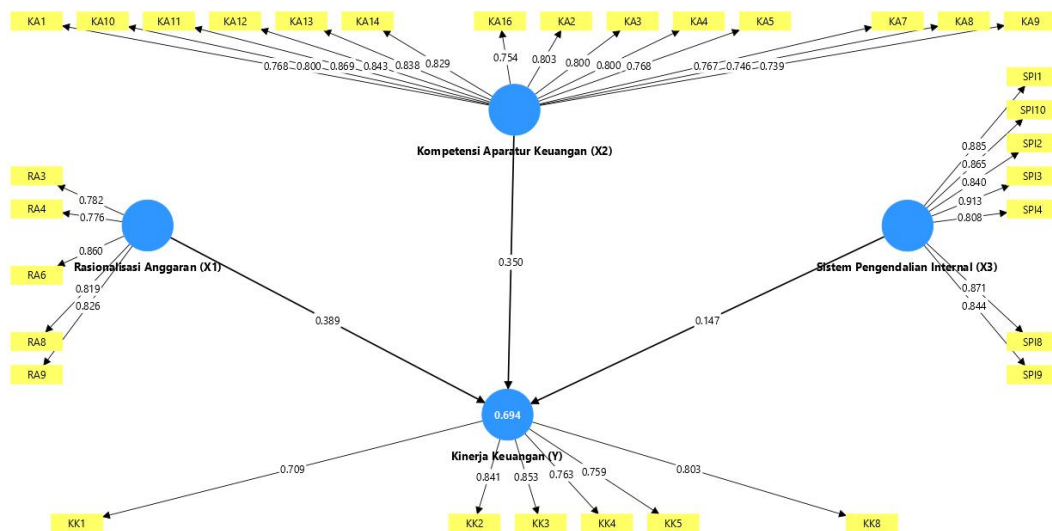
C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Evaluasi Outer Model*

1. Uji Validitas Konvergen (*Convergent Validity*)

Uji validitas konvergen dilakukan untuk mengetahui kemampuan setiap indikator dalam mengukur konstruk atau variabel yang diteliti. Validitas konvergen dievaluasi dengan melihat nilai outer loading masing-masing indikator. Menurut Hair et al. (2021), suatu indikator dinyatakan valid apabila memiliki nilai outer loading lebih besar dari 0,70. Indikator yang memiliki nilai outer loading di bawah 0,70 dapat dipertimbangkan untuk dihapus karena dinilai kurang mampu merepresentasikan konstruk yang diukur.

a. Outer Loading



Gambar 1. Uji Konvergen Validitas setelah Modifikasi
Sumber: Output Smart PLS 4, 2026

Gambar 1 diatas merupakan hasil tampilan output SmartPLS setelah penghapusan indikator yang tidak valid. Setelah dilakukan eliminasi terhadap indikator invalid dan pengujian ulang, seluruh indikator yang tersisa memiliki nilai outer loading di atas 0,70. Sehingga seluruh indikator pada model akhir dinyatakan valid dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

b. Average Variance Extracted (AVE)

Selain dilihat dari nilai *outer loading*, *convergent validity* juga dievaluasi melalui nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Nilai AVE menunjukkan kemampuan suatu konstruk dalam menjelaskan varians indikator-indikator yang membentuknya. Suatu konstruk dinyatakan memenuhi kriteria *convergent validity* apabila memiliki nilai AVE lebih besar dari 0,50.

Tabel 1. Nilai AVE

Variabel	AVE
Kinerja Keuangan	0,623
Kompetensi Aparatur Keuangan	0,633
Rasionalisasi Anggaran	0,661
Sistem Pengendalian Internal	0,742

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan hasil pengujian, variabel Kinerja Keuangan (Y) memiliki nilai AVE sebesar 0,623, Kompetensi Aparatur Keuangan (X2) sebesar 0,633, Rasionalisasi Anggaran (X1) sebesar 0,661, dan Sistem Pengendalian Internal (X3) sebesar 0,742. Seluruh nilai AVE tersebut berada di atas batas minimum 0,50, sehingga menunjukkan bahwa masing-masing konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikator yang digunakan. Dari tabel dapat dilihat bahwa seluruh variabel memiliki nilai AVE lebih besar dari 0,50. Dengan demikian seluruh konstruk telah memenuhi syarat validitas konvergen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah mampu merepresentasikan konstruk yang diukur dengan baik, sehingga model pengukuran

(*outer model*) dinyatakan memenuhi persyaratan validitas konvergen dan layak digunakan untuk tahap pengujian berikutnya.

2. Uji Validitas Diskriminan (*Discriminant validity*)

Uji *discriminant validity* juga dilakukan menggunakan metode *cross loading* untuk memastikan bahwa setiap indikator lebih mampu mengukur konstruk yang menjadi tujuan pengukurannya dibandingkan konstruk lainnya. Suatu indikator dinyatakan memenuhi *discriminant validity* apabila nilai loading pada konstruk yang diukur lebih tinggi dibandingkan nilai loading pada konstruk lainnya.

a. Cross loading

Tabel 2. Cross loading

	Kinerja Keuangan (Y)	Rasionalisasi Anggaran (X1)	Kompetensi Aparatur Keuangan (X2)	Sistem Pengendalian Internal (X3)
KA1	0,504	0,601	0,768	0,593
KA10	0,675	0,697	0,800	0,572
KA11	0,622	0,717	0,869	0,732
KA12	0,570	0,736	0,843	0,674
KA13	0,687	0,618	0,838	0,708
KA14	0,637	0,682	0,829	0,725
KA16	0,583	0,613	0,754	0,673
KA2	0,585	0,553	0,803	0,679
KA3	0,559	0,505	0,800	0,559
KA4	0,591	0,626	0,800	0,716
KA5	0,591	0,691	0,768	0,644
KA7	0,715	0,713	0,767	0,729
KA8	0,712	0,702	0,746	0,605
KA9	0,657	0,609	0,739	0,515
KK1	0,709	0,623	0,618	0,590
KK2	0,841	0,607	0,540	0,532
KK3	0,853	0,659	0,695	0,684
KK4	0,763	0,656	0,741	0,546
KK5	0,759	0,523	0,494	0,494
KK8	0,803	0,662	0,600	0,667
RA3	0,659	0,782	0,700	0,643
RA4	0,610	0,776	0,646	0,572
RA6	0,725	0,860	0,695	0,701
RA8	0,608	0,819	0,694	0,712
RA9	0,612	0,826	0,589	0,651
SPI1	0,685	0,743	0,703	0,885
SPI10	0,572	0,642	0,667	0,865
SPI12	0,697	0,696	0,705	0,840
SPI13	0,767	0,794	0,783	0,913
SPI14	0,581	0,791	0,665	0,808
SPI18	0,614	0,615	0,728	0,871
SPI19	0,545	0,554	0,690	0,844

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan hasil pengujian *cross loading*, seluruh indikator pada variabel Kinerja Keuangan, Rasionalisasi Anggaran, Kompetensi Aparatur Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai *loading* tertinggi pada konstruk yang diukurnya masing-masing. Sebagai contoh, indikator KK3 memiliki nilai *loading* sebesar 0,853 pada variabel Kinerja Keuangan (Y), indikator KA11 memiliki

nilai loading sebesar 0,869 pada variabel Kompetensi Aparatur Keuangan (X2), indikator RA6 memiliki nilai loading sebesar 0,860 pada variabel Rasionalisasi Anggaran (X1), dan indikator SPI3 memiliki nilai *loading* sebesar 0,913 pada variabel Sistem Pengendalian Internal (X3). Hal ini menunjukkan bahwa setiap indikator mampu menjelaskan variabel yang diukur dengan lebih baik dibandingkan variabel lainnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap indikator mampu membedakan konstruk yang diukur dengan konstruk lainnya.

Dengan demikian, berdasarkan hasil *cross loading* dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria *discriminant validity* sehingga model pengukuran layak digunakan untuk analisis selanjutnya.

b. Uji Reliabilitas (*Reability*)

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur tingkat konsistensi dan keandalan instrumen penelitian dalam mengukur konstruk yang diteliti. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* (CR). Suatu konstruk dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* lebih besar dari 0,70.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i> (rho_a)	<i>Composite Reliability</i> (rho_c)
Kinerja Keuangan	0,878	0,882	0,908
Kompetensi Aparatur Keuangan	0,955	0,957	0,960
Rasionalisasi Anggaran	0,872	0,875	0,907
Sistem Pengendalian Internal	0,942	0,949	0,953

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,70. Variabel Kinerja Keuangan memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,878, Kompetensi Aparatur Keuangan sebesar 0,955, Rasionalisasi Anggaran sebesar 0,872, dan Sistem Pengendalian Internal sebesar 0,942.

Selain itu, nilai *Composite Reliability* (rho_c) pada seluruh variabel juga berada di atas 0,70, yaitu masing-masing sebesar 0,908; 0,960; 0,907; dan 0,953. Hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh konstruk memiliki tingkat konsistensi internal yang sangat baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria reliabilitas sehingga instrumen penelitian dinyatakan reliabel dan layak digunakan untuk pengujian model selanjutnya.

B. Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

a. Koefisien Determinasi (R-Square)

Tabel 4. R-Square

Variabel	<i>R-Square</i>	<i>R-Square Adjusted</i>
Kinerja Keuangan	0,694	0,673

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan Tabel diatas, nilai *R-Square* (R^2) untuk variabel Kinerja Keuangan (Y) sebesar 0,694. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Rasionalisasi Anggaran (X1), Kompetensi Aparatur Keuangan (X2), dan Sistem Pengendalian Internal (X3) mampu menjelaskan variasi Kinerja

Keuangan sebesar 69,4%. Sementara itu, sisanya sebesar 30,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Nilai Adjusted *R-Square* sebesar 0,673 menunjukkan bahwa setelah dilakukan penyesuaian terhadap jumlah variabel independen yang digunakan dalam model, kemampuan variabel Rasionalisasi Anggaran, Kompetensi Aparatur Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal dalam menjelaskan Kinerja Keuangan tetap berada pada tingkat yang tinggi, yaitu sebesar 67,3%.

Menurut kriteria Chin (1998), nilai *R-Square* sebesar 0,67 termasuk kategori kuat (*substantial*). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model penelitian memiliki kemampuan yang baik dalam menjelaskan variasi Kinerja Keuangan pada kecamatan di Kabupaten Tanah Datar.

Model struktural yang dibangun dalam penelitian ini memiliki tingkat kemampuan penjelasan yang kuat, sehingga layak digunakan untuk pengujian hipotesis mengenai pengaruh Rasionalisasi Anggaran, Kompetensi Aparatur Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan.

b. Uji Hipotesis

Tabel 5. Hasil Uji Hipotesis

Hipotesis	Hubungan Antar Variabel	Original Sample (β)	T Statistik	P Value	Keputusan
H1	Rasionalisasi Anggaran (X1) → Kinerja Keuangan (Y)	0,389	2,562	0,010	Diterima
H2	Kompetensi Aparatur Keuangan (X2) → Kinerja Keuangan (Y)	0,350	2,741	0,006	Diterima
H3	Sistem Pengendalian Internal (X3) → Kinerja Keuangan (Y)	0,147	0,916	0,360	Ditolak

Sumber: Data primer diolah, 2026

Berdasarkan hasil *bootstrapping*, diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,389, nilai t-statistik sebesar 2,562, dan p-value sebesar 0,010. Nilai t-statistik lebih besar dari 1,96 dan p-value lebih kecil dari 0,05. Nilai t-statistik yang lebih besar dari 1,96 dan p-value yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa Rasionalisasi Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) diterima. Rasionalisasi Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada kecamatan di Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan hasil *bootstrapping*, diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,350, nilai t-statistik sebesar 2,741, dan p-value sebesar 0,006. Nilai t-statistik lebih besar dari 1,96 dan p-value lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H2 diterima, Kompetensi Aparatur Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada kecamatan di Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan hasil *bootstrapping*, diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,147, dengan nilai t-statistik sebesar 0,916, dan p-value sebesar 0,360. Nilai t-statistik yang lebih kecil dari 1,96 dan p-value yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan. Dengan demikian H3 ditolak, Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada kecamatan di Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Rasionalisasi Anggaran dan Kompetensi Aparatur Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan, sedangkan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada kecamatan di Kabupaten Tanah Datar.

Pembahasan

1. Pengaruh Rasionalisasi Anggaran terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel Rasionalisasi Anggaran (X1) memiliki nilai koefisien jalur (*path coefficient*) sebesar 0,389 dengan nilai *t-statistic* sebesar 2,562 dan p-value sebesar 0,010. Nilai *t-statistic* yang lebih besar dari 1,96 dan p-value yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa Rasionalisasi Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa Rasionalisasi Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan rasionalisasi anggaran, maka semakin baik pula kinerja keuangan yang dihasilkan. Rasionalisasi anggaran yang dilakukan secara tepat dapat membantu kecamatan dalam menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan dan prioritas kegiatan sehingga penggunaan sumber daya keuangan menjadi lebih efektif dan efisien. Pengelolaan anggaran yang tepat juga dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Secara teoritis, hasil penelitian ini mendukung teori *stewardship* yang menjelaskan bahwa aparatur pemerintah sebagai pengelola sumber daya publik akan berupaya menggunakan anggaran secara bertanggung jawab demi mencapai tujuan organisasi. Melalui rasionalisasi anggaran yang tepat, aparatur dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia sehingga mampu meningkatkan kinerja keuangan organisasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novitriani, (2022) yang menemukan bahwa rasionalisasi anggaran mampu menghasilkan efisiensi anggaran dan penghematan yang dapat dialokasikan pada program-program yang lebih prioritas. Kesamaan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rasionalisasi anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja keuangan sektor publik. Dengan adanya penyesuaian anggaran yang sesuai kebutuhan dan prioritas program, penggunaan anggaran dapat menjadi lebih terarah, efisien, dan akuntabel sehingga berdampak pada peningkatan kinerja keuangan kecamatan di Kabupaten Tanah Datar.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa rasionalisasi anggaran memiliki peran penting dalam mendukung kinerja keuangan kecamatan. Semakin baik proses rasionalisasi anggaran yang dilakukan, maka semakin baik pula kinerja keuangan yang dihasilkan oleh kecamatan di Kabupaten Tanah Datar.

2. Pengaruh Kompetensi Aparatur Keuangan terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel Kompetensi Aparatur Keuangan (X2) memiliki nilai koefisien jalur (*path coefficient*) sebesar 0,350 dengan nilai *t-statistic* sebesar 2,741 dan p-value sebesar 0,006. Nilai *t-statistic* yang lebih besar dari 1,96 dan p-value yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa Kompetensi Aparatur Keuangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi aparatur keuangan, maka semakin baik pula kinerja keuangan yang dihasilkan. Kompetensi aparatur yang meliputi pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan secara efektif dan akuntabel.

Secara teoritis, hasil penelitian ini mendukung teori *stewardship* yang menyatakan bahwa aparatur pemerintah sebagai pengelola sumber daya organisasi akan berupaya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Aparatur yang memiliki kompetensi yang baik akan lebih mampu menyusun perencanaan, melaksanakan anggaran, menyusun laporan keuangan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara tepat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Molu & Jagongo (2025), yang menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur keuangan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, penelitian Fuada (2021) juga menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang memadai mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kesamaan hasil penelitian ini dengan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kompetensi aparatur keuangan merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kemampuan teknis perlu terus dilakukan guna mendukung peningkatan kinerja keuangan pada kecamatan di Kabupaten Tanah Datar.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, variabel Sistem Pengendalian Internal (X3) memiliki nilai koefisien jalur (*path coefficient*) sebesar 0,147 dengan nilai *t-statistic* sebesar 0,916 dan *p-value* sebesar 0,360. Nilai *t-statistic* yang lebih kecil dari 1,96 dan *p-value* yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan pada kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Internal belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Kinerja Keuangan. Meskipun sistem pengendalian internal telah diterapkan pada kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, keberadaannya belum secara langsung memengaruhi kinerja keuangan yang dihasilkan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penerapan pengendalian internal belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan belum menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan daerah.

Secara teoritis, sistem pengendalian internal berfungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap tercapainya efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun dalam praktiknya, sistem pengendalian internal yang lebih berorientasi pada pemenuhan aspek administratif dan kepatuhan prosedural belum tentu mampu meningkatkan kinerja keuangan secara langsung.

Di sisi lain, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Nurarifah et al. (2023) yang juga menemukan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Begitu juga dengan studi Pradana et al. (2022), menemukan bahwa Sistem Pengendalian Intern secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sistem pengendalian internal belum tentu memberikan dampak yang signifikan terhadap hasil pengelolaan keuangan apabila implementasinya belum berjalan secara optimal.

Pada kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, kinerja keuangan kemungkinan lebih dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kompetensi aparatur keuangan dan rasionalisasi anggaran yang dalam penelitian ini terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Oleh karena itu, peningkatan kinerja keuangan tidak hanya bergantung pada penerapan sistem pengendalian internal, tetapi juga memerlukan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, pengelolaan anggaran yang efektif, serta komitmen organisasi dalam menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal bukan merupakan faktor utama yang memengaruhi Kinerja Keuangan pada kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Meskipun demikian, sistem pengendalian internal tetap memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Rasionalisasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Begitu juga dengan kompetensi aparatur keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pada kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Namun untuk sistem pengendalian internal

tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan kecamatan di Kabupaten Tanah Datar. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian internal belum berjalan secara efektif dalam mendukung peningkatan kinerja keuangan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas pengelolaan keuangan lebih banyak dipengaruhi oleh kemampuan aparatur dalam mengelola keuangan serta ketepatan pelaksanaan rasionalisasi anggaran.

Keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini yaitu Pertama, penelitian hanya dilakukan pada 14 kecamatan di Kabupaten Tanah Datar dengan jumlah responden 47 orang sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Kedua, penelitian hanya menguji tiga variabel yaitu rasionalisasi anggaran, kompetensi aparatur keuangan, dan sistem pengendalian internal, sedangkan masih terdapat faktor lain yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan. Seperti pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan manajemen risiko. Ketiga, data penelitian diperoleh melalui kuisioner sehingga jawaban responden sangat bergantung pada persepsi masing-masing dan berpotensi menimbulkan subjektivitas.

Dengan kendala dan keterbatasan tersebut, selanjutnya disarankan bagi peneliti berikutnya untuk memperluas jangkauan wilayah penelitian dengan melibatkan lebih banyak pemerintah daerah agar hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih baik. Penambahan variabel yang relevan serta penggunaan metode campuran (mixed methods) juga disarankan menghasilkan bukti empiris yang menyeluruh terkait faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari sisi praktis, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar diharapkan terus meningkatkan kualitas perencanaan dan rasionalisasi anggaran berdasarkan skala prioritas, memperkuat kompetensi aparatur melalui pelatihan pengelolaan keuangan dan pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi sistem pengendalian internal agar pengelolaan keuangan kecamatan menjadi lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. (2025). Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Fuada, N. (2021). Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah. *Nobel Management Review*, 2(2), 259–270. <https://doi.org/10.37476/nmar.v2i2.1921>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R* (3rd ed.). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7>
- Mahmudi. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Molu, S. W., & Jagongo, A. (2025). Internal Control Constraints and Performance of Revenue Collection in Marsabit County. *Asian Journal of Economics, Finance and Management*, 7(1), 558–574. <https://doi.org/10.56557/ajefm/2025/v7i11295>
- Novitriani, Y. (2022). Dampak rasionalisasi anggaran terhadap kinerja Kelurahan Papanggo Jakarta Utara [Politeknik STIA LAN Jakarta]. <https://repository.stialan.ac.id/id/eprint/1037>
- Nurarifah, R., Afrizal, A., & L, T. A. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Merangin. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 7(2), 93–104. <https://doi.org/10.22437/jaku.v7i2.16245>
- Pradana, A., Sunardi, S., & Fahmi, M. (2022). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Provinsi Sumatera Bagian Selatan). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 119. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.6802>